

GOTONG ROYONG MELAWAN POLITIK UANG



Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif

Agus Rivanto, Andi Pebriudin, Budi Kurniawan, Budy Sugandi, Dharma Setyawan, Endri Y.
Fathoni, Fatukhatul Khoiriyah, Handi Mulyaningsih, Henky Widjaja, Himawan Indrajat,
Muhammad Febriansyah, M. Yamin Panca Setia, Nova Hadiyanto, Oki Hajiansyah Wahab,
Purwanto, Rahmata Ummah, Robi Cahyadi Kurniawan, Rudy, Titi Anggraini,
Usaidiluh Muchtar, Udo Z. Karzi, Yoso Muliawan

GOTONG-ROYONG MELAWAN POLITIK UANG

Agus Riyanto, Andi Pebriudin, Budi Kurniawan, Budy Sugandi,
Dharma Setyawan, Endri Y, Fathoni, Fatikhatul Khoiriyah,
Handi Mulyaningsih, Henky Widjaja, Himawan Indrajat,
Muhammad Febriansyah, M. Yamin Panca Setia, Nova Hadiyanto, Oki
Hajiansyah Wahab, Purwanto, Rahmatul Ummah,
Robi Cahyadi Kurniawan, Rudy, Titi Anggraini, Ubaidilah Muchtar,
Udo Z Karzi, Yoso Muliawan

GOTONG ROYONG MELAWAN POLITIK UANG

Penulis:

Agus Riyanto, Andi Pebriudin, Budi Kurniawan, Budy Sugandi, Dharma Setyawan, Endri Y, Fathoni, Fatikhatul Khoiriyah, Handi Mulyaningsih, Henky Widjaja, Himawan Indrajat, Muhammad Febriansyah, M. Yamin Panca Setia, Nova Hadiyanto, Oki Hajiansyah Wahab, Purwanto, Rahmatul Ummah, Robi Cahyadi Kurniawan, Rudy, Titi Anggraini, Ubaidilah Muchtar, Udo Z Karzi, Yoso Muliawan

Editor:

Udo Z Karzi

Sampul dan Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Oktober 2015

14 x 21 cm

xii + 94 hlm

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All rights reserved

ISBN :

978-602-72378-2-7

Penerbit :

Sai Wawai Publishing

didiukung oleh:

Pojoksamber.com

KPU Kota Metro

Lakpesdam NU Lampung

Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Metro

Nasyiatul Aisyiah Metro

Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila

Bagian HTN FH Unila

Maarif Institute for Culture and Humanity

SKH Fajar Sumatera

Politik Gentong Babi

Budi Kurniawan

Politik gentong babi atau *pig barrel politics* adalah istilah ilmu politik yang masih terasa asing untuk masyarakat Indonesia. Belum ada literatur yang serius membahas tentang hal ini di Indonesia dan khususnya Lampung. Walau masih jarang dalam kajian ilmu politik di Indonesia, politik gentong babi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari menjelang pemilihan kepala daerah di Lampung.

Politik gentong babi adalah usaha calon petahana untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang populis yang pada praktiknya adalah politik uang secara legal melalui kebijakan populis tersebut (Susan Stoke, 2007:605). Ironisnya, terkadang masyarakat tidak membutuhkan itu, tetapi sengaja pihak yang sedang berkuasa berlaku bak Santa Claus membagikan hadiah-hadiah dengan dana publik.

Contoh nyata praktik model ini dilakukan oleh pemerintah SBY menjelang Pemilu 2009. Pada saat 2008, popularitas SBY turun menurut beberapa lembaga survei karena kebijakannya menaikkan harga BBM. Namun, pada 2009, SBY mengeluarkan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kebijakan kompensasi kenaikan harga BBM.

Meskipun anehnya kebijakan ini dilakukan jelang Pemilu 2009 di saat harga minyak dunia turun. Kebijakan BLT inilah disinyalir beberapa studi sebagai bentuk nyata politik gentong babi di Indonesia. Dengan adanya BLT, popularitas SBY pun kembali naik setelah sebelumnya sempat disalip Megawati di tahun 2008.

Politik gentong babi ini juga terjadi di level lokal. Banyak anggaran publik dihabiskan oleh petahana untuk hal-hal yang sifatnya populis, tetapi tidak tepat sasaran dan cenderung pemborosan anggaran yang tidak produktif. Fenomena yang umum terjadi adalah akan ada peningkatan komponen belanja pemerintah dalam anggaran daerah. Anggaran daerah pada saat jelang pilkada mayoritas digunakan untuk belanja pemerintah yang umumnya untuk program-program populis ini. Bahkan dibanyak kasus banyak kepala daerah terpaksa berutang karena adanya defisit anggaran.

Bentuk politik gentong babi sebenarnya kasat mata, sayang tidak ada yang mampu mengawasi, termasuk lembaga legislatif dan pengawas pemilu. Banyak dana publik dibelanjakan, misalnya untuk hal-hal yang sama sekali tidak produktif. Contoh kasus, misalnya dana publik digunakan untuk memberangkatkan masyarakat tertentu untuk berangkat umrah. Secara hukum akan susah mengatakan hal ini bentuk pelanggaran, tetapi secara etika politik hal ini sebenarnya pelanggaran.

Contoh lain, misalnya, kebijakan serba gratis untuk layanan kesehatan. Kebijakan gratis yang menyeluruh tanpa melihat stratifikasi ekonomi masyarakat tertentu termasuk politik model ini. Kebijakan ini malah menciptakan *free rider*, yakni orang kelas atas yang sebenarnya mampu membayar biaya kesehatan, tetapi akhirnya ikutan gratis. Bagi petahana ini adalah kebijakan yang akan meningkatkan popularitas mereka, tetapi bagi mereka yang secara serius belajar *social policy* ini adalah kebijakan yang tidak efektif.

Seharusnya negara menjamin hanya bagi mereka yang tidak mampu dan kelas menengah yang rentan, bukan semua lapisan ekonomi masyarakat yang tanpa memandang bulu status ekonomi.

Karena politik gentong babi inilah, petahana lebih diunggulkan dalam pemilu. Mereka tidak perlu susah-susah melakukan *money politics* dengan uang pribadi. Dalam banyak praktiknya, terkadang ada pengaburan tentang mana dana privat, mana dana publik. Sering kegiatan petahana yang sejatinya kegiatan privat malah menggunakan dana publik. Untuk menggerakkan tim sukses, misalnya, petahana

melakukan kegiatan yang tidak jarang dananya dari APBD. Bentuk kegiatan mobilisasi masa seperti pengajian dan pentas seni tidak jarang digunakan banyak kepala daerah untuk kepentingan politik ketimbang kepentingan publik.

Contoh lain adalah banyak iklan daerah di media massa dan di reklame pinggir jalan yang sebenarnya informasi publik malah digunakan untuk kampanye secara terselebung. Wajah calon petahana lebih besar ketimbang informasi publiknya. Ironisnya dana yang dipakai adalah dana publik. Dana yang didapat dari pajak kita dan hasil kekayaan alam kita.

Politik gentong babi ini akan semakin berkurang jika ada aturan yang jelas dari pengawas pemilu dan UU yang berlaku. Sayangnya, UU pemilukada terbaru tidak mengatur ini secara khusus. Bisa dikatakan praktik politik gentong babi akan menjadi fenomena yang terus berlangsung di Indonesia karena kelemahan UU dan juga kelemahan pengawasan.

Dampak luasnya adalah pada sistem demokrasi kita yang akan semakin kehilangan substansinya sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Demokrasi kita jika dibangun atas politik gentong babi, yang terjadi adalah politik pembodohan. Petahana akan mudah mengatakan bahwa programnya prorakyat, padahal sejatinya adalah pembodohan massal. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis diklaim program petahana, padahal itu adalah program nasional Pemerintah Pusat. Tidak akan muncul mereka yang memiliki gagasan dalam membangun daerah, tetapi miskin modal. Yang berkompetisi dalam pemilukada hanyalah mereka yang punya uang yang kuat ketimbang mereka yang sebenarnya layak.

Apa solusinya? Pertama, politik gentong babi harus disamakan dengan politik uang dan dianggap sama-sama haram dalam sistem politik kita. Kedua, kaum intelektual seharusnya menyadarkan publik tentang praktik ini bukan sebaliknya larut asyik dalam kekuasaan dan membenarkan kebijakan mereka. Ketiga, perlu ada studi secara serius dari mahasiswa dan akademisi, khususnya di Lampung, untuk membedah fenomena ini. Untuk itu, perlu ada skripsi atau tesis S-2

yang serius untuk membahas fenomena ini di Lampung. Semoga ke depannya rakyat Lampung semakin cerdas dalam berpolitik. *Wallahualam.*



Budi Kurniawan, Kepala Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Lampung